

Analisis Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ali Roho Talaohu*

Universitas Darussalam Ambon, Ambon, Indonesia²

e-mail : galamqia@gmail.com*

ABSTRAK

Kelangsungan negara dapat membawa kesejahteraan masyarakat dusun nasiri kedepannya diperlukan suatu lembaga pendidikan formal pada jenjang Perguruan Tinggi mengenai penerapan ilmu politik sehingga masyarakat berpotensi secara baik dalam mengatur dan mengolah Negara. Oleh sebab itu, Pendidikan memegang peran penting dalam mewujudkan pembangun bangsa . melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang mampu memberikan sumbangan pada negara dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Penelitian bertujuan mengetahui Analisis Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Lokasi penelitian pada Masyarakat Dusun Naisiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik penelitian observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan (1) kurangnya kepedulian pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mensejahterakan pendidikan masyarakat Dusun Naisiri, (2) Dusun Nasiri berperang aktif berbagai bidang secara fisik sehingga di anggap membawa motivasi bagi masyarakat pada dusun lainnya,(3) Perlu adanya peningkatan pendidikan pada masyarakat Dusun Nasiri sesuai potensi masing-masing

Kata Kunci: Analisis, Tingkat Pendidikan, Formal, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan dan perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi multi kompetensi manusia harus melewati proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran dengan demikian proses pembelajaran hendaknya bisa mengembangkan kemampuan dan membentuk watak manusia tercipta pendidikan berkualitas.

Proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercipta apa bila siswa dan guru berperang aktif dalamnya siswa dan guru berinteraksi dalam suatu kegiatan di sebut dengan pembelajaran serta berlangsung dalam proses pembelajaran upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien maka pengajar hendaknya mampu mewujudkan perilaku belajar siswa mulai interaksi yang efektif dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan amanat peraturan pemerintah No.19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan salah satu standar yang harus di kembangkan adalah standar proses karena berkaitan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai proses yang bermutu (Mali, 2013).

Berdasarkan pendidikan masyarakat dusun nasiri peserta didik yang di tentukan oleh guru kegiatan pembelajaran disekolah merupakan kebutuhan yang mutlak yang sangat mendesak. Salah satunya upaya untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran harus meningkatkan pembelajaran proses antara interaksi guru dan siswa agar proses pembelajaran perlu di laksanakan dan dinilai dan di awasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya proses pembelajaran bagi masyarakat dusun nasi pembelajaran yang baik pada setiap mata

pelajaran di sekolah berdasarkan pendidikan masyarakat dusun nasiri yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan masyarakat karena pendidikan sangatlah penting bagi pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan oleh masyarakat.

Tujuan masyarakat dusun nasiri pada dasarnya mengantar para siswa menjukan pada perubahan-perubahan tingka laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Seiring berjalannya waktu munculnya kata demokrasi, demokrasi sebagai aspe penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan terdapat yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya akan mendapat sistemtem politik nasional yang didalmnya terdapat sub sistempolitik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Hirarki suatu suatu jangkauan pengaruh dapat merujuk pada jua jenis atau kelompok demokrasi, yaitu demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal.

Untuk melahirkan suatu pelaku politik yang bisa menjanjikan kelangsungan negara yang dapat membawa kesejahteraan masyarakat dusun nasiri bagi kedepannya maka diperlukan suatu lembaga pendidikan formal melalui jenjang perguruan tinggi ilmu politik dengan demikian akan melahirkan orang-orang yang berpotensi tinggi dalam mengatur dan mengolah Negara. Pendidikan memegang peran peting dalam mewujudkan pembangun bangsa . melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang mampu memberikan sumbangn pada negara dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Agar lahir manusia-manusia yang memberikan sumbangan terhadap pembangunan bangsa, maka proses pendidikan harus mendapat perhatian khusus.

Pendidikan merupakan beberapa rangkaian usaha bimbingan, mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadilah perubahan didalam kehidupan pribadinya, sehingga sebagai makhluk individu, social, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar dimana dia hidup. Proses tersebut senantiasa berada didalam nilai-nilai yang melahirkan norma hidup. Selain jalur pendidikan, masyarakat yang belum sempat tersentuh oleh dunia pendidikan politik, bisa didapatkan pengamatan langsung.

Sebagai Negara yang sedang giat melancarkan pembangunan, maka kita lihat masa sekarang ini pemerintah Indonesia berusaha mengadakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa dan bernegara guna mengejar ketertinggalan dari Negara-Negara maju. Salah satu aspek yang termasuk di dalamnya adalah” pembangunan politik “ yang mempunyai beberapa segi. Salah satu segi di antaranya adalah melibatkan partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang di anggap penting pada akhir-akhir ini, banyak di pelajari orang terutama dalam kaitannya dengan perkembangan Negara-Negara berkembang. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Secara konseptual, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau (*policy*). Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (*countacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya.

Partisipasi politik dapat juga terwujud dengan berbagai bentuk, studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku yaitu kegiatan pemilihan yang mencakup pemungutan suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, berkerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Berpartisipasi dalam pemungutan suara adalah jauh lebih luas di bandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya dan oleh sebab itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lainnya.

Selain itu tingkat partisipasi orang itu berbeda-beda hal ini diantaranya umur, jenis kelamin, status ekonomi dan sosial, pendidikan dan pekerjaan. Di Negara-Negara berkembang sebagaimana hal Indonesia, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang sulit dan rumit untuk di ukur secara jelas dilihat dan di ukur melalui pemilihan atau pemungutan suara.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi politik seseorang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan yang masi rendah kurang menaruh perhatian pada partisipasi politisi.

Orang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupann politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politik..

Agenda kebijakan pemerintah bersumber dari agenda publik. Sementara agenda media, melalui pemberitaannya berupaya menyerap agenda publik sebagai agendanya untuk mempengaruhi dan atau mengubah kebijakan pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu menyusun strategi komunikasi dengan mengedepankan aspek proporsionalitas, menumbuhkan mobilitas sosial dan menciptakan dampak sentripetal. Dampak yang dimaksud adalah membentuk suatu kesatuan, yang harmonis, dinamis dan produktif di masyarakat. Tujuannya adalah menyatukan individu-individu yang terpecah dalam khalayak besar. menuju visi masyarakat informasi dengan nilai, ide, dan informasi yang mewujudkan kemakmuran dalam keadilan dan keadilan dalam kemakmuran sebagai identitas bangsa. Disisi lain, pemerintah atau badan publik juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi (*Right to know*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam kaitan ini badan publik Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan, menerbitkan dan memberikan pelayanan informasi publik (Pembayun et al, 2019). Sejalan dengan reformasi politik yang dicetuskan pada Tahun 1998 yang lalu berdampak luas pada seluruh unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, salah satu institusi yang menikmati reformasi politik adalah Pers atau media massa. Media massa dalam hal ini meliputi media elektronik dan non-elektronik seperti surat kabar, majalah dan

media penerbitan lainnya (Rivers. William, 2003).

Keuntungan yang terlihat dari kebebasan pers ini adalah khalayak dapat menerima berbagai informasi tanpa adanya sensor atau rekayasa, sehingga keterbukaan dalam menilai setiap kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi berbagai kasus-kasus publik misalnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan ataupun pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebebasan pers ini berdampak positif terutama bagi pengawasan terhadap institusi pemerintahan. Selain dari pada itu media.Massa juga cukup membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai oleh pemerintah.

Kebebasan pers pada dasarnya suatu keharusan dalam sebuah negara yang demokratis, persoalan yang sering muncul adalah sejauh mana para jurnalis mengemas sebuah pemberitaan yang tidak provokatif dan tendensius atau memojokkan satu pihak.Tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak bergulirnya reformasi politik dan demokratisasi dalam sehingga keterbukaan dalam menilai setiap kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih terbuka. Salah satu contoh yang dapat dilihat dalam hal ini adalah media massa dapat menginvestigasi pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah. Oleh karena itu kebebasan pers ini berdampak positif terutama bagi pengawasan terhadap institusi pemerintahan. Selain dari pada itu media massa juga cukup membantu pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai program-program pemerintahan dan pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan yang telah tercapai oleh pemerintah (Nurudin, 2003).

Dengan demikian, pendidikan formal, ilmu politik dan komunikasi massa yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong keterbukaan politik

masyarakat. Salah satu ciri masyarakat berdemokrasi adalah adanya keterbukaan. Di antara berbagai pihak dan bahkan institusi diharuskan membuka diri. Selain itu semua orang dianggap sama di hadapan hukum, sosial, dan juga politik. Hal-hal yang bersifat publik tidak boleh ditutupi-tutupi.Itulah keadaan masyarakat terbuka (Nurudin, 2003).

Sikap terbuka dapat dimiliki oleh setiap orang, masyarakat dan warga Negara. Orang yang terbuka akan mendapatkan informasi dan pengetahuan, memper erat persaudaraan, serta memperkuat persatuan. Sifat yang serba tertutup justru dapat merugikan diri sendiri.

Keterbukaan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah keterbukaan-keterbukaan menjadi bukti bahwa pemerintah sanggup bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukannya terhadap rakyat.Seperti yang telah dijelaskan di atas, keterbukaan adalah komunikasi. Jadi, apabila pemerintahan yang ada saat ini bersifat tertutup, akan terjadi kesulitan dalam pembaruan Negara (Afdjani, 2003).

Informasi yang diperoleh diketahui bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa:

1. Partisipasi Polotik Masyarakat Dusun Nasiri dapat dikatakan cukup tinggi, dimana setiap dilaksanakannya pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden maupun kepala daerah mereka selalu aktif.
2. Politik masyarakat Dusun Nasiri dapat digolongkan masyarakat yang demokrasi, karena pada setiap kelompok masyarakat mempertahankan partai politik dukungannya masing-masing walaupun tingkat pendidikan masyarakat mengenai politik masih tergolong rendah.
3. Sosialisasi Pendidikan Politik yang dilakukan pemerintah boleh dikatakan hampir tidak ada, namun keikut sertaan masyarakat Dusun Nasiri dalam proses pemilihan umum keseluruhan

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan Formal.

Pendidikan Formal merupakan usaha yang secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Dilihat dari sudut perkembangan yang dialami oleh anak, maka usaha yang sengaja dan terencana tersebut ditujukan untuk membantu anak dalam menghadapi dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan yang dialaminya dalam setiap periode perkembangan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak.

Branata (1988) mengungkapkan bahwa Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun secara tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Pendidikan juga adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.

Kleis (1974) memberikan batasan umum bahwa :*”pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya”*.

Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan (*stimuli*).

Pertumbuhan ialah perubahan-perubahan

yang terjadi pada jasmani; bertambah besar dan tinggi. Perkembangan lebih luas dari pertumbuhan ialah perubahan-perubahan yang terjadi pada rohani dan jasmaniah. Dengan kata lain, perkembangan merupakan suatu rentetan perubahan yang sifatnya menyeluruh dalam interaksi anak dan lingkungannya.

Oleh karena itu Idris (1982) dalam Lase (2020) mengemukakan bahwa :*”Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memeberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya, dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Potensi disini ialah potensi fisik, emosi, sosial, sikap, moral, pengetahuan, dan keterampilan.”*

Pendidikan formal merupakan salah satu solusi utama untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas karena dengan pendidikan memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan akademis maupun keterampilan lain yang dimiliki peserta didik sehingga dapat digunakan secara efisien untuk bekal hidupnya.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang disusun secara struktur dan mempunyai tingkat atau jenjang serta mempunyai suatu aturan yang tegas dan jelas, dimana pendidikan ini mempunyai suatu bentuk atau organisasi yang terstruktur dan teratur secara baik.

Pendidikan ini kebanyakan memiliki suatu perijinan dan juga lingkup hukum yang melindungi proses pendidikan ini. Pendidikan formal ini yaitu pendidikan disekolah, kampus, maupun lembaga pendidikan formal lain yang sesuai dengan ketentuan sebagai pendidikan formal. Disamping hal tersebut pendidikan formal memiliki ciri-ciri tertentu yaitu meliputi:

- a. Adanya perjenjangan, Pendidikan formal disini memiliki suatu tingkat atau jenjang tertentu yaitu mulai dari jejang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
- b. Program atau bahan pelajaran untuk setiap jenis sekolah bahkan untuk setiap kelas sudah diatur secara formal. Disini berarti bahwa memang sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai bahan ajar yang diberikan pada siswa dan juga program yang tepat diajarkan agar nantinya sasaran pembelajaran

dapat tercapai dengan baik.

- c. Cara atau metode mengajar dipendidikan formal mengikuti pola tertentu yang sudah ditetapkan.. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (11) dan ayat (13)

Tujuan Pendidikan Formal.

Telah kita ketahui bersama bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan tergantung kepada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan pada pernyataan ini, maka perlunya suatu tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan barulah kemudian menyusun suatu program kegiatan yang objektif sehingga segala energi dan kemungkinan biaya yang berlimpah tidak akan terbuang sia-sia.

Apabila kita mau berbicara tentang pendidikan umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan tenaga-tenaga terdidik bagi kepentingan bangsa, negara, dan tanah air. Apabila negara, bangsa dan tanah air kita membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dalam berbagai macam bidang pembangunan, maka segenap proses pendidikan termasuk pula sistem pendidikannya harus ditujukan atau diarahkan pada kepentingan pembangunan masa sekarang dan masa-masa selanjutnya.

GBHN tahun 1999 mencantumkan tentang tujuan pendidikan nasional (Subkhan, 2014) :

”Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas

pembangunan bangsa”

Selanjutnya tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang menyatakan:

”Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Pernyataan-pernyataan diatas tampak jelas bahwa pendidikan harus mampu membentuk atau menciptakan tenaga-tenaga yang dapat mengikuti dan melibatkan diri dalam proses perkembangan, karena pembangunan merupakan proses perkembangan, yaitu suatu proses perubahan yang meningkat dan dinamis. Ini berarti bahwa membangun hanya dapat dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berjiwa pembangunan, yaitu manusia yang dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas, baik material, spriritual serta sosial budaya.

Setiap tindakan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses menuju kepada tujuan tertentu. Tujuan ini telah ditentukan oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu dengan latar belakang berbagai macam faktor seperti sejarah, tradisi, kebiasaan, sistem sosial, sistem ekonomi, politik dan kemauan bangsa.

Berdasarkan faktor-faktor ini UNESCO telah memberikan suatu deskripsi tentang tujuan pendidikan pada umumnya dan untuk Indonesia sendiri tujuan itu telah ditetapkan dalam ketetapan MPR.

Pertama, UNESCO menggaris bawahi tujuan pendidikan sebagai *”menuju Humanisme Ilmiah”*. Pendidikan bertujuan menjadikan orang semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Keluhuran manusia haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka humanisme ilmiah menolak ide tentang manusia yang bersifat subjektif dan abstrak semata. Manusia harus dipandang sebagai makhluk konkrit yang hidup dalam ruang dan waktu dan harus diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat yang tidak boleh diobjekkan. Dalam kerangka ini maka tujuan sistem pendidikan adalah latihan dalam ilmu dan latihan dalam semangat ilmu.

Kedua, pendidikan harus mengarah kepada kreativitas. Artinya, pendidikan harus membuat orang menjadi kreatif. Pada dasarnya setiap individu memiliki potensi kreativitas dan potesi inilah yang

ingin dijadikan aktual oleh pendidikan. Semangat kreatif, non konformist dan ingin tahu, menonjol dalam diri manusia muda. Mereka umumnya bersikap kritis terhadap nilai-nilai yang ada dan jika mereka menemukan bahwa nilai-nilai itu sudah ketinggalan jaman, maka mereka ingin merombaknya. Disini pendidikan berfungsi ganda, menyuburkan kreativitas, atau sebaliknya mematikan kreativitas.

Ketiga, tujuan pendidikan harus berorientasi kepada keterlibatan sosial. Pendidikan harus mempersiapkan orang untuk hidup berinteraksi dengan masyarakat secara bertanggung jawab. Dia tidak hanya hidup dan menyesuaikan diri dengan struktur-struktur sosial itu. Disini seorang individu merealisasikan dimensi-dimensi sosialnya lewat proses belajar berpartisipasi secara aktif lewat keterlibatan secara meyeluruh dalam lingkungan sosialnya. Dalam kerangka sosialitas pada umumnya ini, suatu misi pendidikan ialah menolong manusia muda melihat orang lain bukan sebagai abstraksi-abstraksi, melainkan sebagai makhluk konkrit dengan segala dimensi kehidupannya.

Keempat, tekanan terakhir yang digariskan UNESCO sebagai tujuan pendidikan adalah pembentukan manusia sempurna. Pendidikan bertugas untuk mengembangkan potensi-potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, yang tahu kadar kemampuannya, dan batas-batasnya, serta kerormatan diri. Pembentukan manusia sempurna ini akan tercapai apabila dalam diri seseorang terjadi proses perpaduan yang harmonis dan integral antara dimensi-dimensi manusiawi seperti dimensi fisik, intelektual, emosional, dan etis. Proses ini berlangsung seumur hidup. Jadi konkritnya pada pokoknya pendidikan itu adalah humansisasi, karena itu mendidik berarti "memanusiakan manusia muda dengan cara memimpin pertumbuhannya sampai dapat berdikari, bersikap sendiri, bertanggung jawab dan berbuat sendiri".

Pendidikan Politik.

Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering di samakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah kedalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999) berpendapat bahwa: sosialisasi politik dibagi dua yaitu: pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogi diantara memberi dan menerima pesan.

Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas secara tersirat mengatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Kartini Kartono (1990) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintahan

dilibatkan untuk memecahkannya.

Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat di ambil dari pendapatnya Alfian (1981) dalam Marsudi, (2019) yang mengatakan bahwa:” pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun”.

Dari defenisi yang tertera diatas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak sekedar tahu saja tetapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga Negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan meningkatkan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Rusadi Kartaprawira (1988) dalam Elisa (2016) mengatrikan pendidikan politik sebagai” upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dan dalam sistem politiknya.” Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

Merujuk pada semua pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-

hal dan norma-norma politik dari satu generasi kegenerasi selanjutnya.

Fungsi Pendidikan Politik.

Pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang ada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin di terapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan diatas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

- a) Peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalulintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaaan.
- b) Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat

Tujuan Pendidikan Politik.

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik secara formal terdapat dalam impres No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan

pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya (Lase (2020)).

Partisipasi Politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri dari demokrasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Menurut Budiardjo (1991), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan Umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:140), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain

yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan kearah tujuan dengan stabil dan sukses.

Secara umum jenis-jenis partisipasi politik menurut Rahman (2017):

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
2. Partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Dennis (1987), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipasi politik spectator, orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikotor, spesialis mengadakan kontak tatapan muka, aktifis partai dan pekerjaan kampanye dan aktifis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Kajian pustaka berisikan teori maupun konsepsi yang berasal dari buku maupun literatur lain yang sesuai dengan kajian dan penelitian. Untuk sumber referensi diharapkan menggunakan tahun terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan untuk artikel hasil penelitian adalah sumber-sumber primer berupa jurnal dan laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, dan/atau disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data selanjutnya diuraikan dalam bentuk analisis kualitatif. Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos. M.Si. Penelitian ini telah dilaksanakan di Dusun Nasiri Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan efektifitas dan efisiensi, baik waktu maupun dana yang tersedia.

Penelitian ini telah dilakukan selama satu bulan dan

berlangsung setelah proposal ini di seminarkan dan di setuju. Karena jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka yang diambil sebagai informan kunci adalah Kepala Dusun, sementara informan tambahan yakni Sekretaris Dusun, Kepela Pemuda dan juga masyarakat aktif.

Untuk mengumpulkan data yang seakurat mengenai variabel yang akan dikaji, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi.

Teknik pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dengan cara mengamati dan memperhatikan gejala atau fenomena yang berkaitan dengan keterbukaan politik masyarakat di Dusun Nasiri Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dimana data-data yang didapatkan akan dijadikan sebagai bahan tambahan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini.

2. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan keterbukaan politik masyarakat di Dusun Nasiri Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Studi Kepustakaan.

Adapun data sekunder diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku, majalah, internet dan sumber bacaan lainnya yang erat relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti. Setelah data terkumpul maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut harus sesuai dengan data yang terkumpul dan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif dengan cara mempersentasikan jawaban pada setiap hasil wawancara.

Dengan demikian analisis kualitatif ini memberikan penafsiran terhadap data-data terkumpul, kemudian dianalisa dan disajikan sesuai dengan variabel-variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, untuk selanjutnya mendapatkan gambaran yang jelas tentang Analisis Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Deskripsi Lokasi Penelitian.

Sejarah Singkat Dusun Nasiri. Nama Dusun Nasiri yang diambil dari nama orang yang bernama Nasir yang berhasil membunuh burung garuda yang berkepala tuju. Penduduk pertama kalinya adalah bapak Nasir dan serta keluarganya mereka berasal dari Buton Holimombo didalam lingkungan masyarakat Dusun Nasiri masi terdapat pohon tanaman dan lain-lain. Ruma yang terdiri masi 1 buah seiring berjalanya waktu, maka datanglah beberapa orang kepala kelurga sebagai awal penepati Dusun Nasiri sehingga lama kelamaan masyarakat penduduk Dusun Nasiri mulai banyak, dan munculnya generasi-generasi muda.

Letak dan batas wilayah Kecamatan Huamual, bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leihitu dan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kairatu, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Manipa.

Luas wilayah Kecamatan Huamual tercatat 879,92 km². Desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Luhu sebesar 225,99 km². dan terkecil adalah Desa Kulur sebesar 4,40 km². yang mana Desa Luhu terdiri dari 18 Dusun yaitu, Dusun Olatu, Tapinalu, Erang, Temi, Limboro, Lirang, Nasiri, Kambelo, Talaga, Mangge-Mangge, Amaholu Los, Amaholu Tengah, Asam Jawa, Batu Lubang, Eli Jaya, Air Papaya, Warau, Saluku, Liaela.

Dusun Nasiri berada di petuanan Desa Luhu yang mana letaknya di sebelah kiri berbatasan dengan Dusun Lirang dan sebelah kanan berbatasan dengan Dusun Kambelo, jumlah keseluruhan penduduk Dusun Nasiri yaitu, 1043 Orang, yakni terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 512 Orang sementara penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 531 Orang. Dusun Nasiri memiliki 225 kepala keluarga dan terdiri atas 205 buah Rumah.

Dusun Nasiri secara topografi berupa penggunaan dengan ketinggian 0 (nol) sampai dengan 224 m. Di atas permukaan laut, sehingga tergolong datar rendah. Suhu di daerah ini bersekitar antara 22 derajat saat paling dingin dan 34 derajat saat paling panas. Jenis tana yang ada wilaya ini sebagian besar adalah tana berwarna hitam. Ke arah gunung ada tana yang sama tanah hitam dan juga gunungnya banyak yang tinggi dan juga jurang dan sehingg-hingga dapat terjadinya longsor banjir dan

lain-lain.

2. Tingkat Pendidikan Formal Dan Partisipasi Politik Masyarakat Dusun Nasiri.

Terkait dengan pendidikan formal dan partisipasi politik masyarakat Dusun Nasiri maka berikut ini adalah hasil Wawancara Kepala Dusun Nasiri (Bapak Made Isa, 13 Desember 2019) *“Ya Sebenarnya dapat mempengaruhi kedewasaan berfikir bagi masyarakat Dusun Nasiri bisa membantu tingkat perkonomian masyarakat dan mensejahterakan kehidupan masyarakat dusun nasiri kami masyarakat dusun nasiri nilai-nilai yang di anut untuk menjadi motisipasi kami pada suatu hari nanti”*.

Pendidikan formal di Dusu Nasiri dalam mengupayakan tingkat pendidikan hal ini pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat Dusun Nasiri dan membantu perekonomian. masyarakat Dusun Nasiri..Menurut kepala dusun pendidikan yang di terapkan didalam lingkungan masyarakat Dusun Nasiri menentukan nilai-nilai yang akan di kembangkan nanti hingga pada hari kemudian masyarakat Dusun NSasiri secara intelektual akan siap di pakai, tetapi kurangnya kepedulian pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mensejahterakan pedidikan masyarakat Dusun Naisiri

Dipertegas oleh Sekertaris Dusun Nasiri (Bapak hj Rudin, 14 Desember 2019)

“Ya karena dengan adanya pendidikan tersebut merupakan pendidikan yang di selenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya kami menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat dusun kami, kami sebaga masyarakat biasa dan selayaknya kami menjadi orang-orang yang berkualitas dan bermanfaat”.

Menyingkapi pendidikan formal sangatlah penting bagi masyarakat Dusun Nasiri meskipun ada hambatan dengan pendidikan Mereka. Meraka selalu mengutamakan pendidikan tersebut. Menurut sekretaris Dusun Nasiri yaitu bapak

Hj Rudin mengatakan menyimpulkan bahwa pendidikan masyarakat Dusun Nasiri harus di perembangkan lagi karena kita lihat secara umum sebagian masyarakat perkotaan mereka menuntut ilmu benar-benar serius sehingga mereka mendapatkan beasiswa karena kecerdasan mereka masing-masing.

Pandangan di atas dipertegas oleh Kepala Pemuda Dusun Nasiri (Bapak Sahidi, 15 Desember 2019) bahwa” *Ya menurut saya penting karna setiap pendidikan itu penting bagi masyarakat kami sehingga kekuatan spritual keagamaan kami dan kecerdasan pribadian kami serta dapat di gunakan pada waktunya untuk setiap masyarakat Dusun Nasiri dan berfungsi mengembangkan kemampuan cara pola pikir kami”*.

Menyingkapi pendidikan formal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa sangatlah pendidikan bagi masyarakat Dusun Nasiri sebab menimbulkan kekuatan dan ketrampilan bagi setiap individu dan mengembangkan cara pola pikir masyarakat tersebut.

Dari hasil wawancara di atas adalah penulis simpulkan bahwa partisipasi politik sangatlah penting di mana pelaksanaannya yang di lakukan dengan penuh pertimbangan dan kerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi Kepala Pemuda dikatakan aktif dimana setiap kegiatan berupa pertemuan antara mahasiswa dengan anak pemuda yang akan di lakukan selalu berjalan dengan baik dan lancar karna partisipasi masyarakat setempat selalu berkerjasama sehingga kegitan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat Dusun Nasiri berjalan sesuai mereka pikirkan.

Partisipasi Politik

Data dilapangan menunjukan pandangan masyarakat mengenai partisipasi politik sangat konten dengan berbagai tanggapan, ada yang melihat dari sudut pandangan negatif dan positif. Hal demikian sesuai dengan hasil penelitian pada masyarakat dusun Naisiri yaitu Kepala Pemuda Dusun Nasiri Bapak Sahidi menegaskan

“Menurut saya patisipasi politik itu adalah jalur yang dimana partisipasi itu berlangsung disaat kita melakukan kegitan-kegiatan yang akan di laksanakan pada hari telah tiba contohnya mengadakan acara halal bilhalal itu suatu kegiatan yang harus kita waspadai sebab kita tidak tau kendala-kendala apa yang kita

harus mempersiapkan terhadap kegiatan tersebut”.(15 Desember 2019)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa partisipasi politik sangatlah penting di mana pelaksanaannya yang di lakukan dengan penuh pertimbangan dan kerja sama dengan masyarakat-masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi Kepala Pemuda dikatakan aktif dimana setiap kegiatan berupa pertemuan antara mahasiswa dengan anak pemuda yang akan di lakukan selalu berjalan dengan baik dan lancar karna partisipasi masyarakat setempat selalu berkerjasama sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat Dusun Nasiri berjalan sesuai mereka pikirkan.

Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Ruslin La Berali, Pada Tanggal 17 Desember 2019. Bagaimana tanggapan bapak mengenai partisipasi politik tersebut.

Selain itu ditegaskan juga oleh Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Ruslin La Berali *“Menurut saya penting sekali karna tanpa partisipasi dari masyarakat tindak mungkin berjalan-Nya kegiatan yang di lakukan di Dusun Nasiri dengan baik contohnya seperti kegiatan-kegiatan pemilihan calon kepala Dusun atau sekertaris dusun dan lain-lain”.*(17 Desember 2019)

Dari hasil kutipan di atas menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dusun nasiri melaksanakan kegiatan dengan baik dan setiap masyarakat menjalan tugasnya masing-masing. Jika masyarakat kurang meresponkan kebijakan tingkat pendidikan formal dan partisipasi politik masyarakat Dusun Nasiri. Partisipasi bapak Rusli La Barali sebagai tokoh masyarakat digolongkan dengan baik dimana setiap ada kekurangan di diskusikan kepada kepala Dusun atau masyarakat agar tidakkan yang dia ambil tidak mengecewakan masyarakat lainnya dimana tidakkan itu berupa hak pilih agar tidakkan tersebut tidak mengecewakan pemerintah setempat dan masyarakat setempat.

Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah. Jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas. Pendidikan formal, dimulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke menengah hingga pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, Pendidikan formal dijadikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya Wawancara dengan Toko Masyarakat Yakni Bapak Abidin, menegaskan bahwa *“Ya menurut saya pendidikan itu penting karena kita tidak mungkin menjadi orang-orang terpelajar tujuan pendidikan itu bisa merupa orang ke jalan benar dan merubah cara pikir kita menjadi orang bermanfaat bagi masyarakat kami meskipun anak-anak kami tiap bulan membayar uang SSP kami tidak terbeban dengan membayar uang tersebut karena suda kewajiban kami sebagai orang tua”.* (18 Desember 2019)

Dari hasil wawancara di atas adalah ditegaskan bahwa pendidikan sangatlah penting dan pendidikan dan itu mahal karena setiap bulan mereka membayar uang SPP. Selanjutnya Wawancara dilakukan juga dengan K Tokoh Masyarakat Yaitu Bapak Ruslin La Berali, Pada Tanggal 17 Desember 2019 bahwa *“Ya menurut saya pendidikan di Dusun Nasiri ini sangatlah berperan dalam pembelanjaran dan juga di terapkan dengan baik namu ada kendala-kendalan kurangnya adanya dari pemerintah sehingga semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, di anggap kurang sestematis dan tidak terlaksana”.*

Dari kedua hasi wawancara menunjukan bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga kedepannya mampu memberi sumbangsi pola pikir bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam lingkungan tempat tinggalnya, meskipun materi masih menjadi fokus utama dalam pelaksana pendidikan bersifat formal, hal demikian bukan menjadi kendalam tetapi menjadi suatu motivasi menjadi lebih maksimal dalam memprioritaskan pendidikan formal sebagai hal utama.

PEMBAHASAN

Pendidikan formal masyarakat Dusun Nasiri di golongan sangat baik dimana para orang tua kepada anak-anaknya tersebut. Tidak lupa pula orang tua murid memberikan motisifasi atau dorongan untuk

bersekolah dengan sekolah mereka akan jadi anak-anak membanggakan orang tua dan menggakot deraja masyarakat Dusun Nasiri Sebagai mana membawa motivasi kepada masyarakat yang lain.

Pendidikan dusun nasiri menimbulkan motivasi bagi anak-anak dini dimana anak-anak tersebut mengatakan bahwa saya akan bersekolah supaya menjadi orang-orang yang hebat dan menimbulkan cita-cita akan jadi Polisi Tentara, Guru, Dokter dan lain-lain. Mereka menyebut cita-cita dengan semangat besar sehingga membawa motivasi menjadi orang-orang mandiri mereka menyimpulkan bahwa anak-anak masyarakat Dusun Nasiri sangat baik dimana mereka dengan semangat bersekolah ingin menjadi orang yang berguna, dari pendidikan SD SMP dan SMA, Mereka selalu bersemangat mengejar pendidikan dengan adanya pendidikan membawa mereka kejalan yang lebih baik lagi, masyarakat Dusun Nasiri sebagian tidak melanjutkan jenjang lebih tinggi lagi yang mereka biasa sebut dengan (kulia). Hal ini dikatakan bahwa masyarakat Dusun Nasiri sebagian tidak mampu melanjutkan perguruan tinggi karena faktor dari segi ekonomi.

Pendidik masyarakat Dusun Nasiri di lihat dari proses pengajarnya para guru-guru mendorong siswa siswinya agar mereka lebih giat belajar dan para guru tidak bosan-bosan menasehati para murid yang ada didalam sekolah sehingga menimbulkan kesadaran masing-masing individu belajar bukan untuk orang lain tapi untuk mereka karena dimasa usia mereka sesuatu yang mereka pelajari cepat di pahami dan di tanggapi dengan baik, banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi orang yang tebaik.

Pendidikan masyarakat Dusun Nasiri bukan hanya teori saja tapi para guru mengusulkan agar mereka turun lapangan agar mereka bisa menyimpulkan sama-sama bedanya proses mengajar dalam kelas dengan turun lapangan dan para orang tua mendukung dengan baik kegiatan-kegiatan yang dilakukan para guru-guru di anggap positif saja para orang tua mengatakan yang

penting kegiatan yang di lakukan oleh para guru tidak keluar dari kemampuan mereka sehingga mereka bisa mengulangi kembali dan mereka memberikan contoh buat adik-adik mereka suatu saat nanti. Salah contoh beberapa tahun yang lalu ada musiba yang menyimpah masyarakat Dusun Nasiri adalah banjir besar sebagian besar rumah yang bawa oleh banjir termasuk bangunan sekolah, masyarakat Dusun Nasiri siswa siswinya dalam aktifitas belajar di hentikan dalam beberapa hari, para guru dan para orang tua tidak diam mereka berkerja sama dengan pemerintah setempat agar anak-anak mereka bisa aktifitas kembali dalam proses belajar mengajar, siswa siswi masyarakat dusun nasiri tidak patah semangat biar mereka tidak ada aktifitas mereka selalu belajar dan belajar. Beberapa bulan kemudian dana dari pemerintah suda keluar untuk membangun sekolah agar masyarakat Dusun Nasiri bisa melanjutkan aktifitas kembali mendengar hal itu para guru dan para orang tua murid sangat gembira karena anak-anak mereka bisa sekolah kembali.

Pendidikan masyarakat dusun nasiri dilihat dari secara fisik dari dulu sampe sekarang setiap pada hari jumat para guru selalu mengadakan kerja bakti bersama para siswa mereka kerja mulai dari halaman sekolah samapi mereka membersihkan halaman masjid pada saat itulah kita keunikan para siswa mulai mengajak bercanda agar mereka tidak bosan melakukan kerja bakti setiap mereka melakukan kegiatan kerja bakti tersebut.

Hal ini di simpulkan bahwa pendidikan masyarakat Dusun Nasiri di golongankan aktif dimana para guru dan para orang tua murid melakukan tugasnya masing-masing dengan keterbatasan ekonomi tidak ada hambatan bagi masyarakat Dusun Nasiri agar mereka menjadi orang-orang yang berguna dan terpelajar dan cara berpikir orang terpelajar dan tidak terbelaja paling berbeda

Partisipasi politik masyarakat Dusun Nasiri di golongankan sangat baik dimana masing-masing masyarakat melaksanakan perangnya sebagai tim sukses dalam mengupayakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, contohnya seperti calon kepala daerah, kepala dusun dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat Dusun Nasiri sangat berbeda dengan masyarakat Dusun-Dusun lain mereka wewenang dengan sendirinya tanpa melakuka diskusikan dengan pemerintah setempat yaitu kepala Dusunnya hal ini menyimpulkan bahwa masyarakat Dusun lain tidak patut di contoh karena kurang adanya partisipasi terhadap masing-masing individu.

Partisipasi masyarakat Dusun Nasiri selama ini membawa nama positif bagi masyarakat Dusun lain dimana masyarakat dusun nasiri selalu aktif dan mereka selalu membawa contoh-contoh untuk di patut di contohkan oleh masyarakat lain, masyarakat Dusun Nasiri mempertahankan sesalu setiap apa yang mereka dengarkan dan mereka lihatkan, partisipasi masyarakat Dusun Nasiri bebas menyampaikan aspirasinya sehingga masyarakat lain ikut termotivasi dengan upaya-upaya mereka, sehingga terus di kembangkan pada hari yang akan datang lagi.

KESIMPULAN

1. Dari penjelasan dan urain di atas disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dusun nasiri di nilai sangat baik dimana masyarakat tersebut masing-masing individu tau kelompok bekerja sama dalam rangka membangun pendidikan tersebut.
1. Pendidikan formal dapat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang suatu masyarakat, semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat maka semakin jauh atau semakin dewasa dalam berpikir.
2. Dengan adanya partisipasi politik masyarakat Dusun Nasiri bisa mengembangkan lagi agar kedepannya lebih maju dan nilai-nilai masyarakat Dusun Nasiri harus lebih tinggi lagi agar mendapat haknya.
3. Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat bukan lebih muda dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu di tampung dan di seleksi, kemudian di jadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat.

Saran.

1. Sebagai masyarakat hendaknya kita berusaha meningkatkan peran serta lingkungan pendidikan semaksimal mungkin untuk dapat lebih berprestasi dalam bidang pendidikan.
2. Menyardarkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya partisipasi politik dan manfaat dari partisipasi politik bagi

kehidupan bernegara. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan sosialisasi politik kepada masyarakat itu sendiri, sehingga dengan ini kita bisa menimbulkan kesadaran pada diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

3. Sebagai masyarakat kita harus ikut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Jaminan keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Afdjani, hadiono. 2003. *Komunikasi politik dalam Era keterbukaan*. Suara merdeka, 3 Februari
- Astrid, susanto. 1993. *Pengantar studi komunikasi politik*. Bandung: Orbit shakti.
- Budiardjo, Miriam. 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Branata, Asian. 1988. *Pengertian Pendidikan*, <http://slideshare.net>
- Dennis, McQuail. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Elisa, N. (2016). HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN POLITIK DENGAN GENERASI MUDA. *Kalam Keadilan*, 4(1).
- Lase, B. P. (2020). Pendidikan Politik Melalui Kegiatan Organisasi Mahasiswa IKIP Gunungsitoli (Sosialisasi Politik di Lingkungan Mahasiswa IKIP Gunungsitoli). *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 3(12), 33-42.
- Kartini, Kartono. 1990. *Wawasan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Mali, M. F. (2013). PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG PELAYANAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DESA KERTA BUMI KECAMATAN KUARO KABUPATEN

PASER.

Marsudi, K. E. R., & Sunarso, S. (2019). Revitalisasi Pendidikan Politik Melalui Pembentukan Kampung Anti Money Politic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 111-121

Nurudin. 2003. *Komunikasi Massa*. Malang : CESPUR

Pembayun, D. A., Oktafianto, A. B., & Assegaff, S. B. (2019). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KEMKOMINFO. *Jurnal Jurnalisa*, 5(1).

Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN, 2598, 5973*

Warsito. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

William R. Rivers at.al. 2003. *Media Massa Dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Subkhan, I. (2014). Gbhn Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Gbhn. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 5(2), 131-143.

Surbakti, Ramlan, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana Indonesia.